

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2021



<https://sumbawabaratkab.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat 2021

ISSN/ISBN: -

No. Publikasi: 52070.2114

Katalog: 4102004.5207

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xvi + 86 halaman

Naskah:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat

Penyunting:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar Kulit:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat.

<https://sumbawabaratkab.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat 2021

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Arrief Candra Setiawan, S.ST, M.Si

Penanggung Jawab:

Arrief Candra Setiawan, S.ST, M.Si

Editor:

Dwi Sulistiarini, S.ST

Penulis dan Pengolah Data:

Dwi Sulistiarini, S.ST

Gambar Kulit:

Karina Dwi Agustiarini, S.Tr.Stat

Infografis:

Karina Dwi Agustiarini, S.Tr.Stat

<https://sumbawabaratkab.bps.go.id>

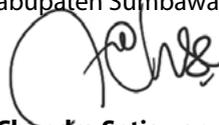
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat 2021” dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Publikasi ini menggambarkan kesejahteraan rakyat melalui beberapa indikator pada masing-masing bidang pembangunan. Bidang pembangunan yang dimaksud disini adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan dan perumahan.

Sumber data yang dipergunakan dalam publikasi ini sebagian besar berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan ditambahkan beberapa data tambahan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terkait, yang sudah memberikan kontribusi pada penyusunan publikasi ini. Kami menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan publikasi ini, untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas publikasi ini di masa mendatang.

Taliwang, November 2021
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sumbawa Barat



Arrief Chandra Setiawan, S.ST, M.Si

<https://sumbawabaratkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
BAB 1. Pendahuluan	1
BAB 2. Metodologi	7
BAB 3. Kependudukan.....	21
BAB 4. Kesehatan.....	33
BAB 5. Pendidikan	43
BAB 6. Ketenagakerjaan.....	53
BAB 7. Kemiskinan dan Pola Konsumsi.....	63
BAB 8. Perumahan.....	75

<https://sumbawabaratkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sumbawa Barat, 2015-2021	23
Tabel 4.1 Persentase Ibu yang Melahirkan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Tempat Melahirkan, 2020.....	39
Tabel 4.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Sumbawa Barat, 2020.....	42
Tabel 5.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2020	47
Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas Kabupaten Sumbawa Barat, 2020.....	79

<https://sumbawabaratkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di NTB, 2021	24
Gambar 3.2 Piramida Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, 2021	25
Gambar 3.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, 2015-2021	27
Gambar 3.4 Komposisi Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, 2015- 2021	29
Gambar 3.5 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumbawa Barat, 2015- 2021	30
Gambar 3.6 Rata-rata Umur Kawin Pertama Wanita Usia 10 Tahun ke Atas Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020.....	31
Gambar 3.7 Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Kawin Pertama Kabupaten Sumbawa Barat, 2021	32
Gambar 4.1 Angka Kesakitan (Morbiditas) Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020.....	36
Gambar 4.2 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020.....	37
Gambar 4.3 Persentase Ibu yang Melahirkan Menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2019-2020.....	38
Gambar 4.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi Penggunaan Alat KB di Kabupaten Sumbawa Barat, 2019-2020.....	41

Gambar 5.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kabupaten Sumbawa Barat, 2020.....	45
Gambar 5.2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020 (Tahun)	48
Gambar 5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Umur Kabupaten Sumbawa Barat, 2020	49
Gambar 5.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat, 2020	50
Gambar 6.1	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Sumbawa Barat, 2017-2020	56
Gambar 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sumbawa Barat, 2017-2020	57
Gambar 6.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumbawa Barat, 2017-2020	59
Gambar 6.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sumbawa Barat, 2020.....	60
Gambar 6.5	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Sumbawa Barat, 2020	62
Gambar 7.1	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020	66
Gambar 7.2	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020.....	66
Gambar 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020	68

Gambar 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020	69
Gambar 7.5	Garis Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun, 2016- 2020	71
Gambar 7.6	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sumbawa Barat, 2019-2020	72
Gambar 7.7	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Sumbawa Barat, 2019-2020	73
Gambar 8.1	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, 2020	77
Gambar 8.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas Kabupaten Sumbawa Barat, 2020.....	78
Gambar 8.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas Kabupaten Sumbawa Barat, 2020.....	80
Gambar 8.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Per Kapita Kabupaten Sumbawa Barat, 2020	81
Gambar 8.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar Kabupaten Sumbawa Barat, 2020	82
Gambar 8.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Sumbawa Barat, 2020.....	83
Gambar 8.7	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Sebagai Sumber Penerangan di Kabupaten Sumbawa Barat, 2020	84

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyak faktor mempengaruhi terwujudnya kesejahteraan, baik sosial, ekonomi, potensi wilayah maupun budaya dan karenanya pembangunan harus dapat meliputi semua aspek tersebut. Secara nasional, strategi pembangunan ditekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan sekaligus ditujukan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kendatipun demikian pada pelaksanaannya, aspek ekonomi cenderung mendapatkan prioritas yang lebih besar dibandingkan aspek pembangunan manusia.

Salah satu proses pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tidak saja berupa kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian dan perumahan, tetapi juga kebutuhan non fisik, seperti pendidikan, keamanan, hiburan, status sosial, dan kesempatan kerja. Dalam usaha mempercepat terpenuhinya kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan berbagai program di bidang-bidang yang strategis, seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan. Kesemuanya itu memerlukan perencanaan sekaligus monitoring dan evaluasi yang cermat dan terarah. Hal ini penting agar dapat terlihat sejauh mana pembangunan telah berdampak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam program pembangunan berikutnya dapat dilakukan perbaikan sekaligus penyempurnaan sehingga dapat lebih optimal.

Data akan indikator yang mencerminkan kesejahteraan rakyat menjadi suatu alat ukur yang jelas dibutuhkan. Dengan demikian selain penyediaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat, penyediaan data yang lengkap, cermat, tepat waktu

dan berkesinambungan juga merupakan faktor penunjang proses pembangunan yang sangat menentukan kemajuan selanjutnya. Salah satu indikator dibidang sosial yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indikator Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kesejahteraan Rakyat ini merupakan dampak dalam arti indikator tersebut mengilustrasikan pengaruh atau dampak langsung dari pembangunan. Dari Indikator Kesejahteraan Rakyat ini dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kesejahteraan rakyat seperti derajat kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, lingkungan, penduduk miskin, pola konsumsi dan lain-lain. Data statistik yang digunakan dalam penyusunan indikator ini dipilih sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, proses serta perkembangan kesejahteraan rakyat.

Untuk menyajikan data statistik yang mampu mencakup semua segi kesejahteraan rakyat, merupakan hal yang tidak mungkin, karena tidak semua aspek kesejahteraan dalam pengertian luas seperti disebutkan di atas, dapat diukur secara statistik. Indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur. Berbeda halnya dengan statistik ekonomi yang pengumpulan datanya relatif lebih mudah, lebih sering dan lebih teratur, statistik sosial yang merupakan komponen penyusunan Inkesra pengumpulan datanya relatif lebih sulit, lebih jarang dan kurang teratur pengumpulan datanya di lapangan.

Giatnya pembangunan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat tergambar secara kualitatif tanpa dukungan data yang memadai dan terkini. Keterbandingan dengan daerah lain juga belum dapat diukur tanpa adanya data. Oleh

sebab itu paparan data mengenai indikator kesejahteraan rakyat mutlak diperlukan. Informasi yang dituangkan dalam bentuk tabel dan grafis dimaksudkan agar data dapat lebih mudah dipahami.

1.2. Ruang Lingkup

Publikasi ini berisi data dan ulasan singkat mengenai berbagai variabel yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk dan rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2021. Dimensi yang akan disajikan akan dipadukan dalam beberapa bab yang meliputi indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, fertilitas dan keluarga berencana, serta perumahan.

1.3. Sumber Data

Dalam penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat 2021, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi resmi maupun dari Dinas/Instansi terkait.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian pada publikasi ini pada intinya berupa tabel yang disertai ulasan singkat (analisa deskriptif) terhadap beberapa data dari masing-masing variabel yang ada dalam ruang lingkup penulisan

Penulisan "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat 2021" ini dibagi ke dalam delapan bab. **Bab pertama** menguraikan latar belakang penulisan, tujuan, dan sistematika penulisan. **Bab kedua**

membahas mengenai konsep dan definisi yang digunakan dalam penulisan ini. **Bab ketiga** menyajikan gambaran umum penduduk, seperti jumlah, pertumbuhan, kepadatan, struktur umur dan sebagainya.

Kemudian **bab keempat** membahas tentang indikator kesejahteraan dari sisi kesehatan, seperti angka morbiditas dan sebagainya. **Bab kelima** menjabarkan indikator kesejahteraan dari sisi pendidikan, seperti rata-rata pendidikan penduduk, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni dan melek huruf. **Bab keenam** memberikan gambaran mengenai jumlah angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. **Bab ketujuh** membahas tentang kemiskinan dan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. **Bab kedelapan** memberikan gambaran mengenai situasi perumahan di Kabupaten Sumbawa Barat, seperti kepemilikan rumah dan kelayakan rumah.

BAB 2

METODOLOGI



2.1. Kependudukan

- a. **Penduduk** adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.
- b. **Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah persentase perubahan penduduk dalam periode tertentu (biasanya setahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

Keterangan :

P_t adalah jumlah penduduk pada tahun t

P_0 adalah penduduk pada tahun 0

r adalah laju pertumbuhan penduduk

- c. **Tingkat Kepadatan** adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang bersangkutan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Kepadatan}(\text{Jiwa}/\text{km}^2) = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}(\text{Jiwa})}{\text{Luas Wilayah}(\text{Km}^2)}$$

- d. **Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Jenis Kelamin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki} - \text{Laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

- e. **Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun) atau penduduk usia muda dan 65 tahun ke atas atau penduduk usia tua dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Angka Beban Tanggungan} = \frac{\text{Penduduk Usia } 0 - 14 \text{ dan } 65 +}{\text{Penduduk Usia } 15 - 64} \times 100$$

- f. **Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total** adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya.

g. **Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga**

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

1. **Rumah tangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada beberapa macam bentuk rumah tangga biasa, diantaranya:

- Orang yang tinggal bersama isteri dan anaknya;
- Orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri;
- Keluarga yang terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen;
- Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondok nya kurang dari 10 orang;

- Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya;
- Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.

2. Rumah tangga khusus adalah

- orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga dan,
- kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah lebih dari 10 orang.

Rumah tangga khusus **tidak** dicakup dalam Susenas.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasa bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

h. Status Perkawinan

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami (bagi perempuan) atau isterinya (bagi laki-laki) dan pada saat pencacahan belum kawin lagi.

2.2. Kesehatan

- a. **Angka Harapan Hidup (AHH)** adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup (dalam tahun) dari lahir yang dapat ditempuh oleh seseorang.
- b. **Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk pada saat tertentu. Presentase penduduk yang mengalami keluhan

kesehatan diantaranya panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi atau keluhan lainnya juga termasuk orang yang memiliki penyakit akut atau penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan). Rumus penghitungan:

$$PKK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

- c. **Angka Morbiditas (Angka Kesakitan)** merupakan presentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (sakit). Rumus penghitungan:

$$AM = \frac{\text{Jumlah Penduduk Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

- d. **Rata-rata Lama Sakit** adalah rata-rata lamanya terganggu kesehatan (dalam hari) yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan. Menunjukkan rata-rata lama hari sakit yang dialami penduduk. Rata-rata lama sakit dimaksud selama satu bulan terakhir (maksimal per individu 30 hari). Rumus penghitungan:

$$RRLS = \frac{\text{Total Hari Lama Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk yang Sakit}} \times 100$$

- e. **Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan** adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan yang tersedia.
- f. **Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis** adalah rasio banyaknya proses persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, paramedis, bidan, dan perawat) terhadap seluruh persalinan yang terjadi pada saat tertentu.

- g. Mengobati sendiri** adalah upaya art yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/ resep dari tenaga kesehatan/batra). Menunjukkan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang mengobati sendiri. Rumus penghitungan:

$$PPSO = \frac{PSO}{JPS} \times 100$$

PPSO : Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang mengobati sendiri.

PSO : Jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang mengobati sendiri.

JPS : Jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit.

- h. Berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya art yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah art. Menunjukkan banyaknya penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang berobat dengan mengunjungi fasilitas kesehatan. Rumus penghitungan:

$$PPSJ = \frac{PSJ}{JPS} \times 100$$

PPSJ : Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang berobat dengan mengunjungi fasilitas kesehatan.

PSJ : Jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang berobat dengan mengunjungi fasilitas kesehatan.

JPS : Jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit.

2.3. Pendidikan

- a. **Bersekolah adalah** kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disetarakan.
- b. **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.
- c. **Masih bersekolah** adalah sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- d. **Tidak bersekolah lagi** adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- e. **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.
- f. **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf lain dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas.

$$AMH = \frac{\text{Penduduk 15 tahun keatas yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100$$

- g. **Angka Parisipasi Sekolah (APS)** adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah

dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$APS_i = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah kelompok umur } i}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur } i}$$

i = kelompok usia = 7-12, 13-15, 16-18

- h. Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah perbandingan jumlah penduduk yang masih sekolah pada jenjang tertentu (SD, SLTP atau SLTA) pada kelompok usia yang sesuai dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian.

$$APM_i = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah usia bersesuaian}}{\text{Jumlah penduduk usia bersesuaian}}$$

i = jenjang = SD (7-12), SMP (13-15), SMA (16-18)

2.4. Ketenagakerjaan

- a. Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.
- b. Menganggur** adalah keadaan seseorang di mana selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau putus asa dalam mencari pekerjaan.

- c. **Angkatan Kerja (AK)** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, dan sebagainya) serta mereka yang sedang menganggur..
- d. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah atau mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan.
- e. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas). Rumus yang digunakan yaitu:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+)}} \times 100$$

- f. **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan (sedang bekerja atau sementara tidak bekerja) terhadap total penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Rumus yang digunakan adalah:

$$TKK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

- g. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur (tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tapi belum mulai bekerja) terhadap jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Rumus yang digunakan adalah:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

- h. Lapangan usaha/pekerjaan** ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.
- i. Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

2.5. Perumahan

- a. Luas Lantai** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruang khusus untuk usaha (misalnya warung).
- b. Dinding** adalah sisi luas/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- c. Atap** adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut
- d. Air Leding** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen

melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).

- e. **Air Sumur/perigi terlindung** bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut sumur atau perigi.
- f. **Kloset/Dudukan leher angsa** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
- g. **Plengsengan** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
- h. **Cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan penampungan akhir.
- i. **Lainnya** adalah tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk yang tidak mempunyai jamban/kakus.

2.6. Kemiskinan dan Pola Konsumsi

- a. **Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan di bawah garis kemiskinan
- b. **Garis Kemiskinan** adalah nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yaitu

2.100 kkal/kapita/ hari ditambah kebutuhan dasar non makanan khususnya untuk pangan dan papan.

- c. Konsumsi/pengeluaran (makanan maupun non makanan)** adalah nilai pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga baik berasal dari pembelian, produksi sendiri atau pemberian. Untuk konsumsi yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian, nilainya diperhitungkan sesuai dsengan harga pasar setempat.
- d. Pengeluaran per kapita** adalah rata-rata pengeluaran per orang dalam rumah tangga atau besarnya pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga.

BAB 3

KEPENDUDUKAN

Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2021

2,91



Jumlah Penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat

159.980 jiwa

Rasio Jenis Kelamin
Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2021

105,14

Artinya, dari 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 105 orang penduduk laki-laki pada tahun 2021

Salah satu komponen dari suatu negara atau wilayah administrasi adalah keberadaan penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Besar kecilnya jumlah penduduk di suatu wilayah berhubungan dengan beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk yang besar sejalan dengan tingginya permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar penduduk, seperti permintaan layanan sarana dan prasarana pendidikan.

Penduduk dapat menjadi nilai tambah sekaligus beban bagi pemerintah daerah apabila tidak dapat ditangani dengan baik. Sisi negatif jumlah penduduk yang besar adalah jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya (*resources*) daerah, seperti kemampuan keuangan, maka dapat memperlambat upaya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Daerah yang didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai dan jumlah penduduk yang sedikit akan memiliki ruang yang lebih luas dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar bisa menjadi aset yang berharga bagi daerah jika berkualitas. Karena bagaimanapun juga, penduduk tidak hanya sebagai objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek atau pelaku pembangunan itu sendiri. Artinya, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat mewujudkan pembangunan yang juga berkualitas.

Dalam bab ini akan disajikan mengenai gambaran umum kependudukan di Kabupaten Sumbawa Barat, seperti jumlah, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, distribusi penduduk, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya.

3.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

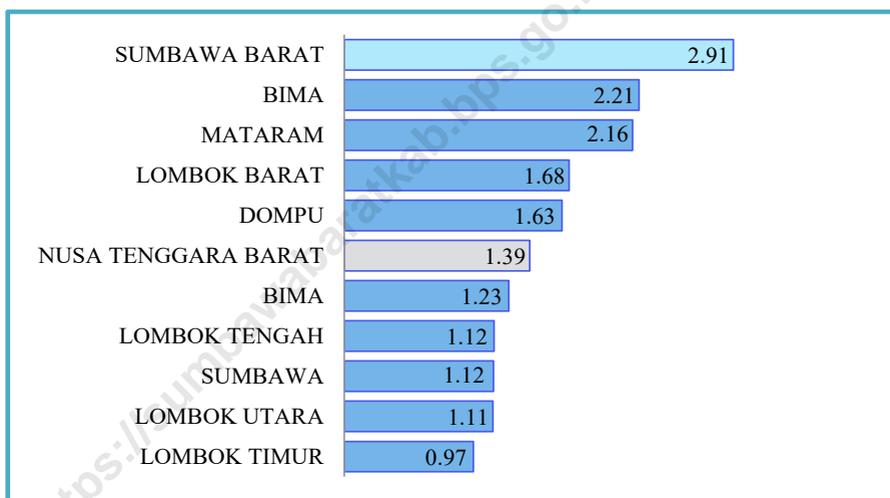
Pertumbuhan penduduk adalah satu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu ada dampak positif sekaligus dampak negatif yang ditimbulkan. Dari sisi positif, penambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan kualitas sumber daya yang baik merupakan modal utama untuk melaksanakan pembangunan. Dari sisi negatif, penambahan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar penduduk. Jumlah penduduk memang selalu meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan yang terkendali akan mampu menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sumbawa Barat, 2015-2021

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Penduduk	133.761	137.974	142.251	146.591	150.992	155.452	159.980
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	-	3,15	3,10	3,05	3,00	2,95	2,91
Rasio Jenis Kelamin (%)	102,52	102,98	103,42	103,86	104,29	104,72	105,14

Jumlah penduduk Sumbawa Barat pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015 telah menembus angka 159,9 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 4,5 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dalam tujuh tahun terakhir (2015-2021), jumlah penduduk Sumbawa Barat telah mengalami penambahan sekitar 26 ribu jiwa.

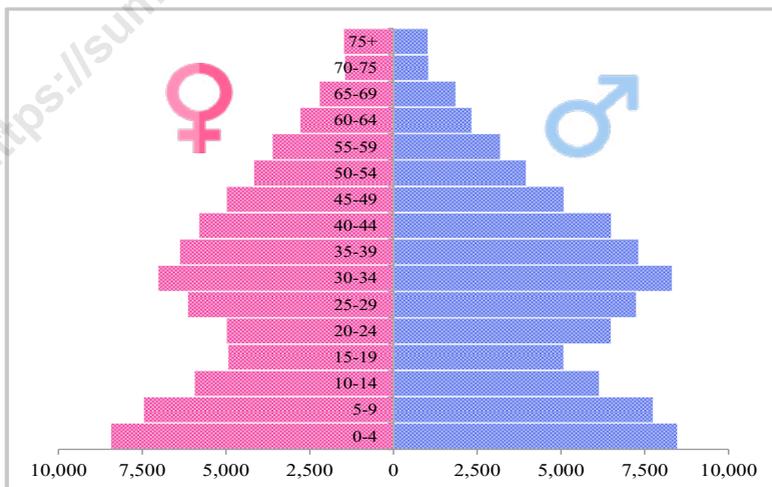
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di NTB, 2021



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi NTB, jumlah penduduk Sumbawa Barat paling kecil. Walaupun jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat paling kecil, akan tetapi dari segi laju pertumbuhan penduduk menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di NTB sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1 di atas. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat masih jauh di atas laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTB yang hanya sebesar 1,39 persen pada tahun 2021.

Pada Tabel 3.1, terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2021 sebesar 105,14. Artinya, diantara 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Selama tujuh tahun terakhir (2015-2021) angka rasio jenis kelamin Kabupaten Sumbawa Barat selalu bernilai di atas 100, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini sejalan dengan kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan di sekitar Kabupaten Sumbawa Barat yang sebagian besar adalah untuk pekerja laki-laki, sehingga pendatang di Kabupaten Sumbawa Barat didominasi oleh laki-laki. Dominasi perusahaan pertambangan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara memberi pengaruh yang kuat terhadap dinamika kependudukan di Kabupaten Sumbawa Barat hingga saat ini. Rasio jenis kelamin dapat memberikan gambaran kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berbasis gender.

Gambar 3.2 Piramida Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, 2021



Dari piramida penduduk di atas, terlihat variasi pola perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur. Di kelompok umur 0-49 tahun, penduduk laki-laki terlihat lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kemudian pada kelompok umur di atas usia 49 tahun terlihat penduduk perempuan lebih dominan.

3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan yang senantiasa perlu mendapat perhatian. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya tampung sumber daya alam dan pranata sosial ekonomi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan.

Informasi mengenai distribusi atau sebaran penduduk bermanfaat untuk mengetahui wilayah-wilayah mana yang menjadi konsentrasi penduduk. Ada kecenderungan penduduk terkonsentrasi wilayah perkotaan atau ibu kota kabupaten dikarenakan umumnya wilayah tersebut memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai seperti sekolah, rumah sakit, tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu konsentrasi penduduk juga terlihat pada wilayah-wilayah yang tanahnya subur atau wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam.

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki luas wilayah terbesar keempat diantara sepuluh kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, akan tetapi memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat masih rendah, meski laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi.

Sekitar 3,02 persen penduduk NTB tinggal di Sumbawa Barat dengan luas wilayah 1.742,27 km². Pada tahun 2021, kepadatan penduduk Sumbawa Barat mencapai 91 jiwa/km². Dari tahun ke tahun trennya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Selama periode 2015-2021, kepadatan penduduk Sumbawa Barat mengalami penambahan sebesar 15 jiwa/km². Salah satu faktor yang mendorong semakin padatnya Sumbawa Barat adalah potensi sumber daya alam yang dimiliki terutama pertambangan.

Gambar 3.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, 2015-2021



3.3. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Dependency Ratio merupakan gambaran mengenai beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap usia tidak produktif, baik itu usia muda (0-14 tahun) maupun usia tua (65 tahun ke atas). Secara kasar, rasio ketergantungan dapat menjadi indikator yang menggambarkan

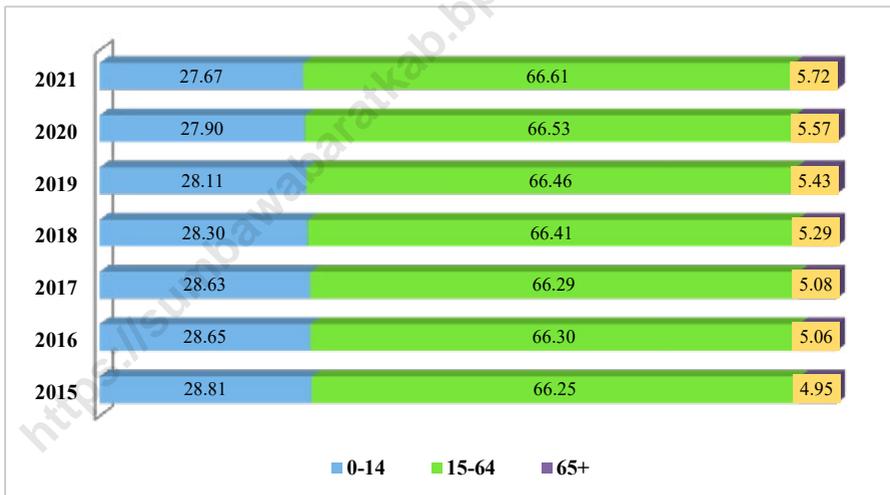
kondisi ekonomi suatu wilayah. Pada umumnya wilayah yang telah maju secara ekonomi memiliki rasio ketergantungan yang rendah, sebab penduduk produktif akan semakin sedikit menanggung beban penduduk tidak produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Bonus demografi juga dapat ditentukan kapan akan diraih dengan melihat rasio ketergantungan. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan bagi pembangunan sebab jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi usia muda dan usia lanjut semakin kecil.

Berdasarkan piramida penduduk pada Gambar 3.2, pada tahun 2021 komposisi penduduk usia produktif dan tidak produktif di Kabupaten Sumbawa Barat hampir berimbang. Hal ini tentunya merupakan suatu hal yang menggembirakan dan menunjukkan potensi besar untuk memasuki bonus demografi. Untuk menjadikan penduduk usia produktif ini sebagai sebuah potensi, harus dapat dijamin kualitas penduduk tersebut. Dengan penduduk yang berkualitas, daya saing penduduk tersebut akan tinggi sehingga secara langsung akan berdampak pada kualitas kesejahteraan penduduk. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif ini harus diimbangi dengan meningkatnya lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja harus dijaga oleh pemerintah untuk dapat menampung penduduk usia produktif tersebut agar tidak meningkatkan jumlah pengangguran.

Komposisi penduduk usia produktif di Kabupaten Sumbawa Barat cenderung dominan dan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir persentasenya terus meningkat. Tak hanya penduduk usia produktif, kelompok usia tua juga mengalami peningkatan persentase setiap tahunnya. Bertambahnya komposisi penduduk usia tua juga memberikan signal bahwa derajat kesehatan masyarakat Sumbawa Barat semakin baik.

Jika kita melihat struktur umur penduduk, penduduk usia produktif terlihat dominan, penduduk usia muda juga tergolong cukup besar yaitu sekitar 28 persen dari total penduduk Sumbawa Barat. Jumlah yang cukup besar ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Karena penduduk usia muda tersebut suatu saat akan menggantikan generasi yang di atasnya. Untuk itu pemerintah perlu menjaga kualitas anak di usia muda, bahkan sejak anak-anak lahir, dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikannya.

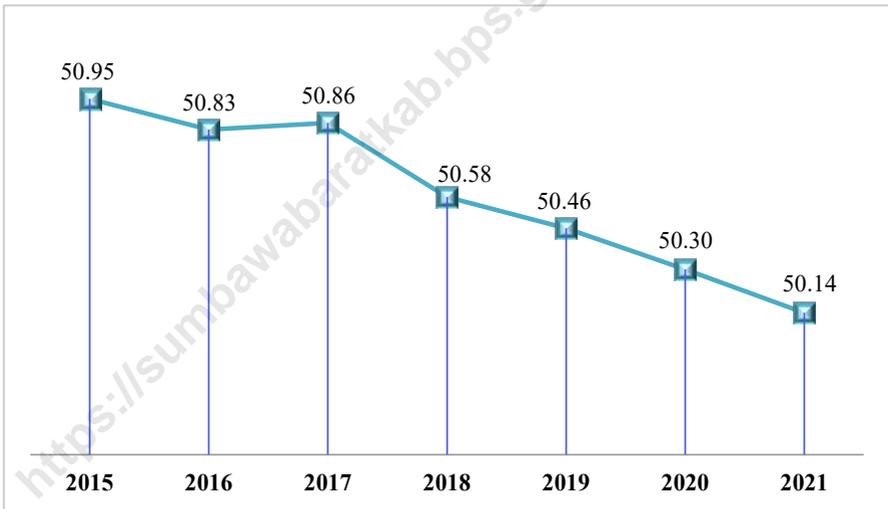
Gambar 3.4 Komposisi Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, 2015-2021



Angka beban ketergantungan di Kabupaten Sumbawa Barat cenderung mengalami penurunan selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2021, penduduk usia produktif mencapai 106,6 ribu jiwa atau 66 persen dari total penduduk. Angka beban ketergantungan tercatat sebesar 50,41 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 50 orang penduduk usia tidak produktif.

Penurunan rasio ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi, dimana bonus demografi tersebut terjadi jika nilai rasio ketergantungan dibawah 50 persen. Tanpa disadari, tampaknya Kabupaten Sumbawa Barat sedikit lagi menuju bonus demografi. Pemerintah Sumbawa Barat perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi agar dapat memetik hasil yang optimal dari fenomena ini.

Gambar 3.5 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumbawa Barat, 2015-2021



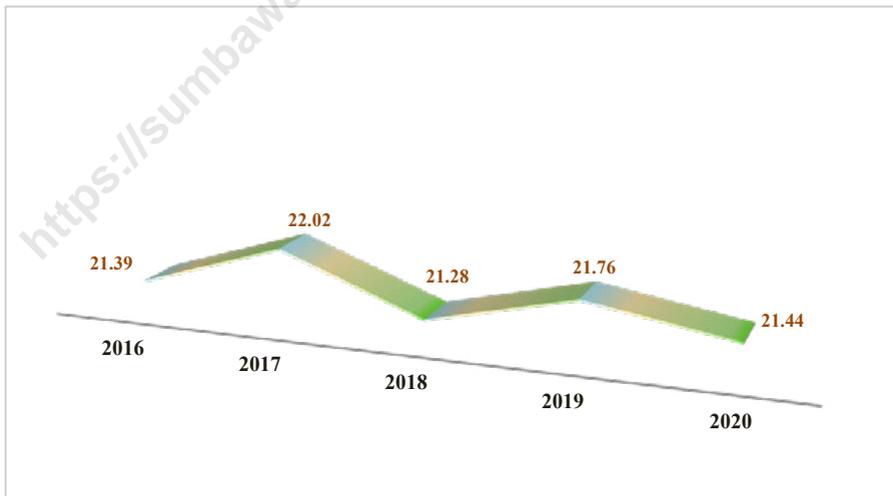
3.4. Wanita Menurut Usia Kawin Pertama

Pernikahan secara naluri akan menjadi salah satu tujuan manusia hidup untuk melanjutkan keturunan. Kematangan fisik dan emosi menjadi pondasi dasar perkawinan yang kemudian ditunjang oleh kesiapan materi. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama masa reproduksinya. Semakin lama masa reproduksi

wanita, semakin besar kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak. Dalam perjalanannya, budaya sangat memengaruhi kecenderungan seorang wanita untuk menikah muda. Kodrat wanita untuk menikah dan mengurus rumah tangga masih tertanam di pemikiran kaum wanita.

Pernikahan usia muda secara agama memang tidak dilarang, namun beberapa penelitian telah membuktikan bahwa akan lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah muda. Selain karena alasan emosi yang belum stabil, alasan kesehatan fisik juga mendasari, dimana apabila wanita menikah muda akan lebih rentan terhadap penyakit reproduksi. Masih kentalnya budaya menikah muda tercermin dari usia perkawinan pertama.

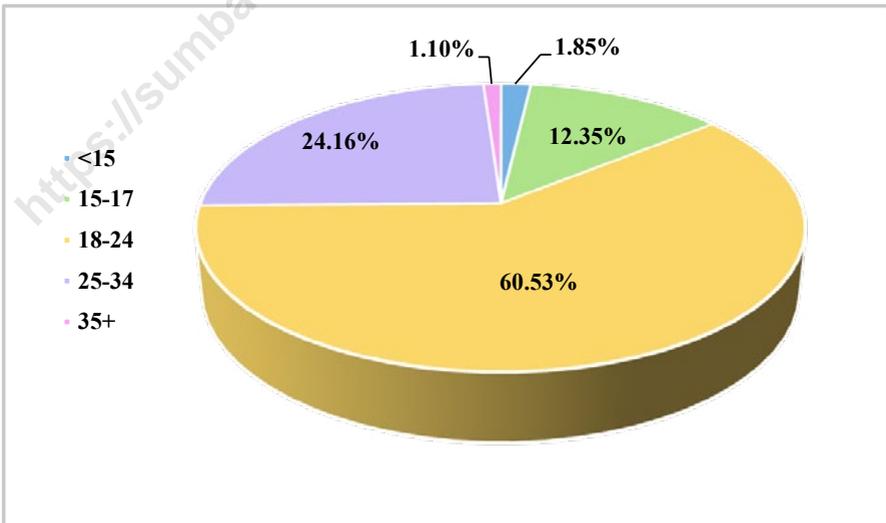
Gambar 3.6 Rata-rata Umur Kawin Pertama Wanita Usia 10 Tahun ke Atas Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020



Rata-rata umur perkawinan pertama wanita di Sumbawa Barat pada tahun 2021 sebesar 21,44 tahun. Artinya, rata-rata wanita yang tinggal di Sumbawa Barat kawin pertama kali pada umur 21 hingga 22 tahun.

Jika dilihat menurut kelompok umur perkawinan pertama, lebih dari separuh wanita di Sumbawa Barat kawin pada umur 18-24 tahun yaitu sebesar 60,53 persen. Selain itu, 24,16 persen wanita kawin pada usia 25- 34 tahun, dan 12,35 persen ibu kawin pada umur 15-17 tahun. Sementara itu, masih terdapat sekitar 1,85 persen wanita yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 15 tahun dan 1,10 persen yang umur kawin pertamanya lebih dari 35 tahun.

Gambar 3.7 Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Kawin Pertama Kabupaten Sumbawa Barat, 2021



BAB 4 KESEHATAN



Angka Kesakitan (Morbiditas)
Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020

17,82

Umur Harapan Hidup
Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020

68,07

Kesehatan adalah salah satu indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Dahulu kesehatan seolah hanya dimiliki oleh masyarakat yang memiliki uang, namun sekarang dengan hadirnya BPJS diharapkan dapat membantu masalah kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Meski tidak terlihat secara langsung dampaknya, namun kesehatan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan akan meningkatkan kualitas manusia sehingga bisa menjadi sejahtera dan sebaliknya kesejahteraan akan meningkatkan kualitas kesehatan manusia.

Pada skala nasional, pemerintah telah meluncurkan berbagai program di bidang kesehatan, diantaranya program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas). Keterbatasan kemampuan APBN di dalam menjamin seluruh penduduk yang berhak telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Sasaran utama pembangunan bidang kesehatan adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, bermutu, dan merata untuk semua masyarakat, sehingga akan mewujudkan masyarakat yang tangguh, sehat, cerdas, kreatif, produktif dan berbudi luhur. Titik berat upaya pembangunan bidang kesehatan ditekankan pada pelayanan kesehatan melalui sarana dan prasarana kesehatan yang ada secara baik dan optimal.

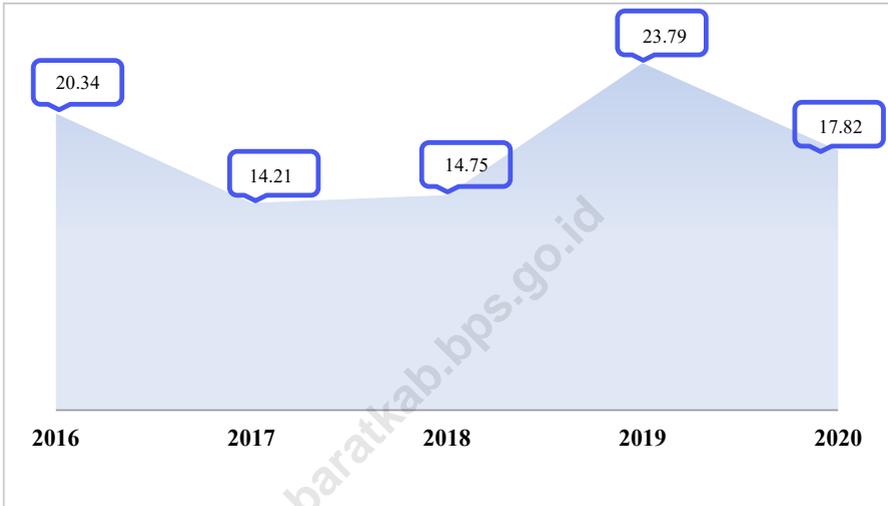
4.1. Keluhan Kesehatan (Morbiditas)

Secara kontekstual, morbiditas diartikan sebagai keadaan sakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup sehingga dalam bahasa awam lebih dikenal dengan istilah keluhan kesehatan. Dinas Kesehatan mencatat keluhan kesehatan berdasarkan pencatatan atas kasus yang terjadi di fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dll), sedangkan BPS melalui Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) mencatat keluhan kesehatan di rumah tangga. Dengan begitu, individu yang memiliki keluhan kesehatan namun tidak berobat ke fasilitas kesehatan akan tetap tercakup.

Morbiditas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Dalam Susenas, ditanyakan mengenai gejala yang dirasakan sebagai keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit seperti panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lain-lain. Tingginya angka morbiditas mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Gejala adanya penyakit secara umum menjadi keluhan kesehatan. Beberapa keluhan yang umum dialami oleh manusia adalah batuk, pilek, panas, asma/sesak napas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lainnya. Pada tahun 2020, terdapat penurunan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini terlihat pada gambar di bawah ini. Angka kesakitan (morbiditas) Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 mencapai 17,82 persen, turun dibandingkan tahun 2019. Angka tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2019 yang tembus di atas dua puluh persen.

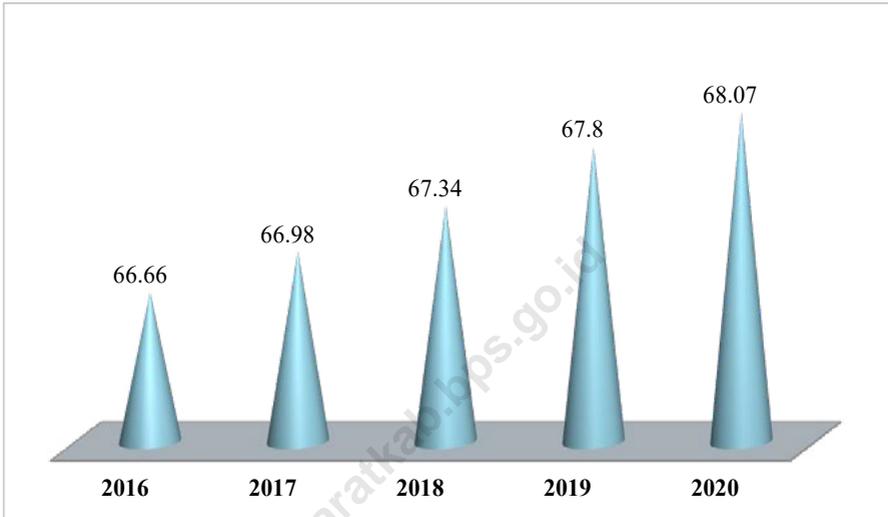
Gambar 4.1 Angka Kesakitan (Morbiditas) Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020



4.2. Umur Harapan Hidup

Harapan manusia untuk panjang umur adalah dengan hidup sehat. Oleh sebab itu, banyak yang mengaitkan rendahnya angka kesakitan dengan tingginya angka harapan hidup. Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Indikator UHH menjadi penting dalam strategi pembangunan kesehatan pemerintah daerah karena indikator ini digunakan dalam penghitungan IPM. Sebagai indikator dampak, UHH dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan keseluruhan kegiatan pembangunan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 4.2 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020



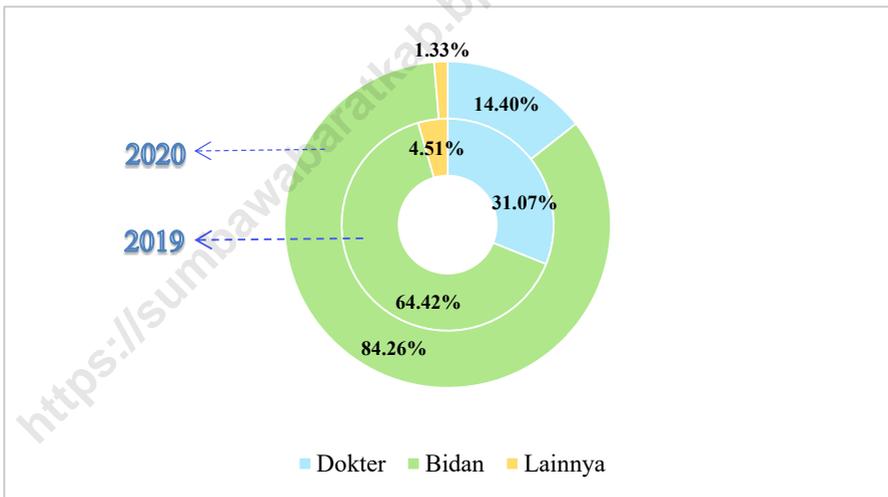
Jika pada tahun 2016 penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 66,66 tahun, di tahun 2020 harapan ini meningkat hingga menjadi 68,07 tahun. Artinya bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 68 tahun 1 bulan. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten dengan angka harapan hidup paling tinggi dibandingkan delapan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2021.

4.3. Penolong Kelahiran

Indikator kesehatan lainnya yang juga perlu untuk dilihat adalah pemanfaatan tenaga dan fasilitas kesehatan dalam penolong persalinan. Dalam hal ini diharapkan banyak masyarakat yang melahirkan di fasilitas kesehatan yang tersedia serta dibantu oleh tenaga medis dengan

melakukan tindakan sesuai dengan prosedur kesehatan. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir kematian ibu dan bayi. Turunnya angka kematian ibu dan bayi turut ditunjang oleh penolong persalinan. Penolong persalinan yang telah dilatih dan memiliki kemampuan medis yang memadai akan dapat bertindak cepat apabila terjadi komplikasi pada saat proses persalinan. Berbagai upaya untuk memperluas akses ke sarana pelayanan serta tenaga kesehatan telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu selama proses kehamilan dan persalinan.

Gambar 4.3 Persentase Ibu yang Melahirkan Menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2019-2020



Kesadaran akan keselamatan ibu dan bayi pada saat proses persalinan pada masyarakat Sumbawa Barat sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan untuk penolong persalinan yang merujuk kepada tenaga medis. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase persalinan yang dibantu oleh dokter baik dokter spesialis kandungan maupun dokter umum yaitu dari 31,07 persen pada tahun

2019 menjadi 14,40 persen. Meskipun begitu, penolong persalinan yang dibantu oleh bidan mengalami peningkatan dari 64,42 persen pada tahun 2019 menjadi 84,26 persen pada tahun 2020. Walaupun masih terdapat beberapa persen persalinan dibantu oleh tenaga non medis, tetapi pilihan untuk melakukan persalinan pada fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan dibantu oleh tenaga medis sangat dominan.

Dari berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia untuk proses persalinan, Puskesmas dan rumah sakit masih menjadi pilihan utama masyarakat. Tercatat sebanyak 27,78 persen proses persalinan dilakukan di Puskesmas dan 23,99 persen di rumah sakit. Hal ini dikarenakan ketersediaan fasilitas di Puskesmas juga sudah hampir sama dengan yang ada di rumah sakit, serta akses untuk mencapainya yang relatif lebih mudah karena tersedia di setiap kecamatan. Ditambah lagi akses masyarakat untuk ke Puskesmas sekarang tersedia 24 jam. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, ibu yang tinggal di perkotaan lebih banyak memilih rumah sakit sebagai tempat melakukan persalinan karena aksesnya lebih mudah dijangkau.

Tabel 4.1 Persentase Ibu yang Melahirkan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Tempat Melahirkan, 2020

Tempat Melahirkan	Perkotaan	Perdesan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
RS pemerintah/RS Swasta/RSIA	27,96	21,32	23,99
Rumah Bersalin/Klinik	17,37	5,37	10,19
Puskesmas	20,93	32,38	27,78

Tempat Melahirkan	Perkotaan	Perdesan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pustu	0,00	1,13	0,67
Praktik Nakes	17,67	7,03	11,31
Polindes/Poskesdes	13,35	24,63	20,10
rumah	2,72	8,15	5,97
Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

4.4. Keluarga Berencana

Program keluarga berencana telah menjadi program unggulan pemerintah sejak era orde baru untuk menekan masalah kependudukan dan mencegah terjadinya babyboom. Seiring berjalannya waktu, eksistensi program ini semakin melemah. Pemerintah telah menyiasatinya dengan mengubah slogan “Dua Anak Cukup” menjadi gerakan untuk menjarangkan kelahiran dan merencanakan pernikahan. Perencanaan jumlah anggota keluarga dapat dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini memungkinkan untuk dilakukan kontrasepsi terhadap pria selain kondom.

Pada era orde baru, pemerintah Indonesia sempat mendapatkan penghargaan dari kesuksesan program Keluarga Berencana (KB). Untuk menghadapi tantangan kependudukan yang akan datang, KB perlu digalakkan kembali. Selain masalah kepadatan penduduk, KB juga dapat menurunkan Rasio Ketergantungan dan bahkan mengurangi angka kemiskinan.

Partisipasi terhadap program Keluarga Berencana di Sumbawa Barat mengalami sedikit peningkatan. Terlihat dari persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang menggunakan alat KB mengalami peningkatan sebesar 1,04 persen, dari 48,16 persen pada tahun 2019 menjadi 49,20 persen di tahun 2020. Artinya hampir separuh perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin sedang menggunakan alat KB. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan pernah menggunakan alat KB di tahun 2020 sebesar 14,89 persen. Artinya ada hampir seperenam perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah tidak menggunakan KB lagi pada tahun 2020. Sedangkan 35,91 persen perempuan lainnya memilih untuk tidak menggunakan KB. Nilai ini sedikit menurun walau tidak signifikan dibandingkan tahun 2019 (36,37 persen).

Gambar 4.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi Penggunaan Alat KB di Kabupaten Sumbawa Barat, 2019-2020



Alat kontrasepsi yang menjadi instrumen penting untuk mengatur kehamilan cukup beragam, mulai dari yang modern hingga tradisional. KB suntik menjadi metode yang paling banyak digunakan oleh perempuan di Sumbawa Barat pada tahun 2020, yaitu sebanyak 64,90 persen. Artinya lebih dari separuh perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Sumbawa Barat memilih menggunakan metode suntik sebagai alat KBnya. Berikutnya disusul susuk KB/implants sebagai pilihan alat KB yang paling diminati oleh perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu sebanyak 11,29 persen.

Tabel 4.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Sumbawa Barat, 2020

Alat/KB yang digunakan	Persentase
(1)	(2)
Sterilisasi wanita/ tubektomi/ MOW	2,98
Sterilisasi pria/ vasektomi/ MOP	0,00
IUD/ AKDR/ Spiral	12,91
Suntikan	64,90
Susuk KB/ implan	11,29
Pil	6,83
Kondom pria/ karet KB	1,09
Intravag/ kondom wanita/ diafragma	0,00
Metode Menyusui Alami	0,00
Pantang Berkala/Kalender	0,00
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

BAB 5 PENDIDIKAN



Angka Partisipasi Sekolah **99,58**
(7-12 tahun)

Angka Partisipasi Sekolah **94,84**
(13-15 tahun)

Angka Partisipasi Sekolah **79,19**
(16-18 tahun)

Angka Melek Huruf
Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020

93,63



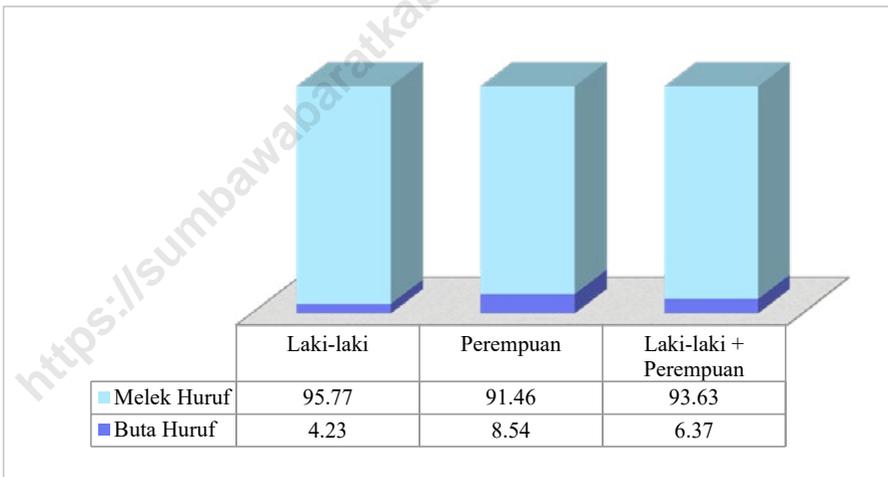
Pendidikan dan kesejahteraan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan tentunya kecenderungan untuk memiliki pendidikan yang tinggi juga semakin tinggi (Saripudin, 2008). Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi suatu bangsa karena dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas sehingga mendukung dalam negara atau wilayah tersebut.

Pendidikan tidak memandang status sosial, kondisi ekonomi, suku, etnis, maupun gender sehingga semua orang berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Pendidikan akan meningkatkan intelektualitas, kecakapan, dan kapabilitas seseorang sehingga mendorong terwujudnya pembangunan manusia serta masyarakat yang madani dan modern dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dilakukan oleh pemerintah, mulai dari menyediakan sarana sekolah yang memenuhi standar pendidikan hingga menambah tenaga pengajar yang berkualitas bahkan memberikan insentif bagi pengajar di daerah terpencil. Pemerintah juga mengupayakan pendidikan dasar gratis bagi setiap warga masyarakat serta bantuan bagi siswa miskin untuk dapat terus mengenyam pendidikan. Efektif atau tidaknya program pendidikan yang dijalankan akan nampak melalui indikator pendidikan. Beberapa indikator pendidikan yang penting dan lazim digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan lain-lain. Meningkatnya intelektualisme yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknologi, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

5.1. Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar/minimal yang harus dimiliki seseorang untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca informasi dari berbagai sumber dapat membuka wawasan, dan menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Angka melek huruf adalah indikator yang menggambarkan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis. Ukuran yang digunakan adalah kemampuan baca tulis penduduk umur 15 tahun ke atas. Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sumbawa Barat sudah cukup bagus. Hal ini

terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin ataupun huruf lainnya pada tahun 2020 persentasenya cukup besar yaitu 93,63 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan AMH penduduk perempuan. Pada tahun 2020, AMH penduduk laki-laki di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 95,77 persen, sedangkan AMH penduduk perempuannya hanya sebesar 91,46 persen.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Tahun 2020 tercatat penduduk Sumbawa Barat yang berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 6,37 persen. Sedangkan menurut jenis kelamin, angka buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

5.2. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuan intelektual dan kompetensi yang dimilikinya semestinya juga lebih baik. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi salah satu indikator kualitas manusia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan, diharapkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga semakin meningkat.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2020

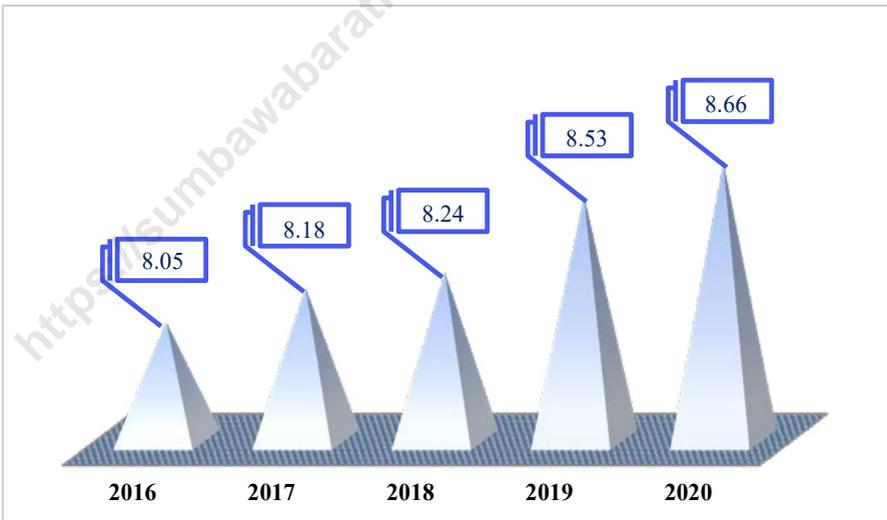
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Persentase
(1)	(2)
Tidak Punya Ijazah	13,92
SD/MI	27,33
SMP/MTs	15,83
SMA/MA	25,85
SMK/MAK	4,42
Diploma I dan Diploma II	0,83
Diploma III	1,21
Diploma IV/S1, S2, S3	10,61
Jumlah	100,00

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan persentase penduduk menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didekati dengan Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Terlihat bahwa persentase tertinggi penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SD/Sederajat, yaitu sekitar 27,33 persen. Persentase tertinggi berikutnya adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA/Sederajat, yaitu sekitar 25,85 persen. Persentase jumlah penduduk yang memiliki ijazah tertinggi setingkat perguruan tinggi, baik diploma, S1, S2, maupun S3 hanya sebesar 10,61 persen. Bahkan terdapat 13,92 persen penduduk yang tidak memiliki ijazah.

5.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Populasi yang digunakan PBB untuk penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya, mengingat umumnya penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun telah menyelesaikan pendidikan formal. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, RLS dihitung dengan asumsi bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Gambar 5.2 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020 (Tahun)



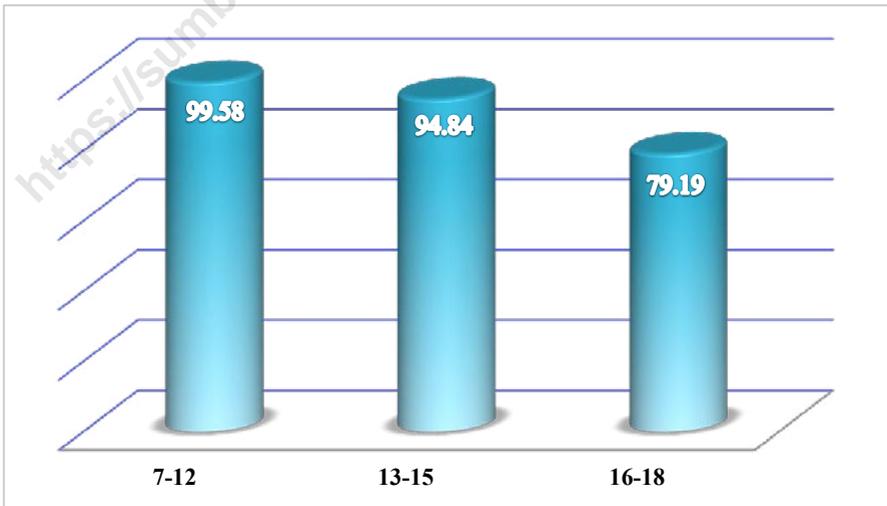
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 mencapai 8,66 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 8,53 tahun. Artinya, pada tahun 2020 rata-rata penduduk usia

25 tahun ke atas di Kabupaten Sumbawa Barat mengenyam pendidikan formal selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat. Hal ini tentunya masih jauh dari program pemerintah Wajib Belajar 12 Tahun.

5.4. Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) juga ikut diperhitungkan.

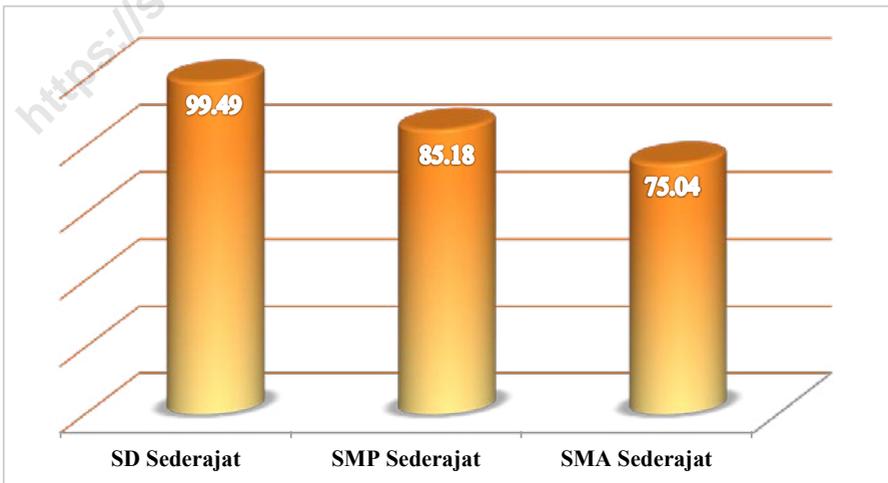
Gambar 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Umur Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 pada jenjang umur 7-12 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SD/ sederajat mencapai 99,58 persen. Artinya 99,58 penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang berusia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Pada jenjang umur 13-15 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMP/ sederajat, APS Kabupaten Sumbawa Barat relatif tinggi yaitu mencapai 94,84 persen. Artinya, kurang dari 6 persen penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang berumur 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Sedangkan pada jenjang umur 16-18 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat, APS Kabupaten Sumbawa Barat hanya mencapai 79,19 persen. Artinya masih ada sekitar seperlima penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang berumur 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2020.

Gambar 5.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Indikator yang paling tepat untuk menggambarkan tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Karena APM memperhatikan ketepatan usia sekolah pada kelompok usia yang bersesuaian. APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sama seperti APS dan APK, dalam penghitungan APM pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Jika nilai APM mencapai 100 persen artinya seluruh anak usia sekolah telah dapat bersekolah tepat waktu.

Pada jenjang pendidikan SD/Sederajat, APM Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 99,49 persen. Artinya, hampir seluruh penduduk yang berusia 7-12 tahun di Kabupaten Sumbawa Barat sudah bersekolah tepat waktu yaitu pada jenjang SD/Sederajat. APM Kabupaten Sumbawa Barat pada jenjang SMP/ sederajat di tahun 2020 sebesar 85,18 persen. APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat, yaitu sebesar 75,04 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar seperempat penduduk yang berusia 16-18 tahun di Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak bersekolah tepat pada jenjang SMA/ sederajat sebagaimana seharusnya.

BAB 6

KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020 (Persen) **69,73**

Jumlah Angkatan
Kerja Tahun 2020
78.582



Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) **5,50**
Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020 (Persen)

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang menjadi sasaran utama pembangunan, sebab sangat terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang menjadi tujuan utama pembangunan nasional. Jumlah penduduk Indonesia yang besar telah membawa konsekuensi jumlah angkatan kerja yang besar pula. Jika tanpa diiringi oleh kecukupan lapangan usaha, maka akan banyak penduduk yang menjadi penganggur.

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Masalah ketenagakerjaan tidak lepas dari beberapa isu utama seperti tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakmampuan lapangan pekerjaan yang ada dalam mengatasi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah. Artinya ketika daya serap lapangan pekerjaan rendah, maka dapat menimbulkan masalah pengangguran yang tinggi. Kemudian tingkat pendidikan pekerja yang rendah juga mencerminkan rendahnya kualitas pekerja yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka. Isu yang saat ini sedang hangat pula adalah makin tingginya pengangguran terdidik atau pengangguran dengan lulusan pendidikan menengah ke atas, hal ini mengindikasikan belum adanya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap pengangguran terdidik ini.

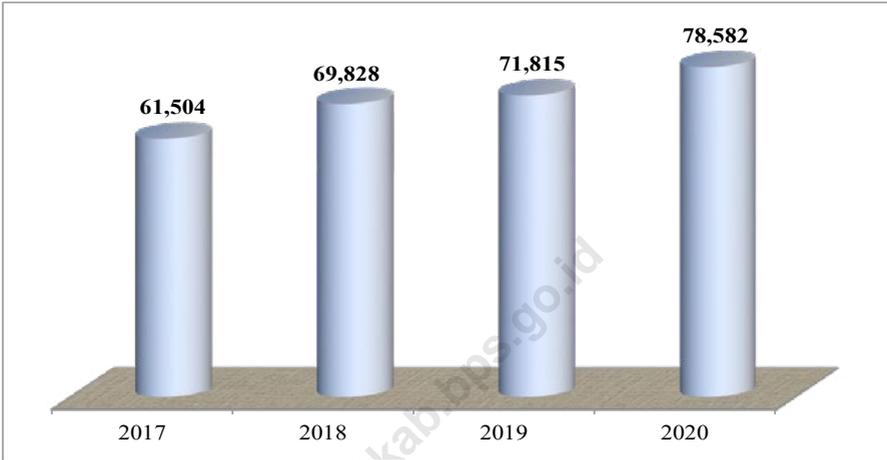
Terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan masalah pokok dalam ketenagakerjaan. Bertambahnya penduduk usia kerja seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin akan memunculkan permasalahan ketenagakerjaan yang lebih banyak.

Untuk memperluas lapangan kerja, beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong investasi dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong investasi, pemerintah perlu menciptakan situasi yang aman untuk investasi, prosedur pengurusan izin yang mudah dan sebagainya. Kemudian terkait pemberdayaan masyarakat, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk membuka lapangan usaha secara mandiri melalui pemberian bantuan modal usaha, membantu pemasaran hasil usaha dan sebagainya.

6.1. Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dikategorikan ke dalam dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk dalam angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, termasuk juga pengangguran. Penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya termasuk sebagai bukan angkatan kerja.

Gambar 6.1 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Sumbawa Barat, 2017-2020



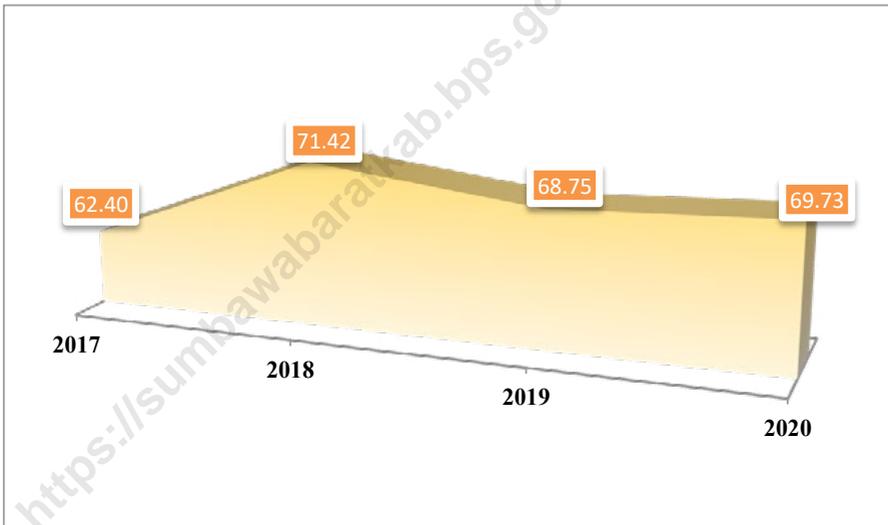
Berdasarkan Gambar 6.1, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu empat tahun (2017-2020) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 78,6 ribu orang, telah terjadi peningkatan sebesar 17 ribu orang sejak tahun 2017.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Secara umum, apabila tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Namun, merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan jika TPAK tinggi tetapi tidak diiringi oleh tingginya

(tingkat kesempatan kerja). TPAK dan TKK harus berjalan searah. Jika tidak demikian, adanya peningkatan penduduk pencari kerja berarti kurang bisa terserap dalam lapangan pekerjaan. Yang demikian itu dapat memicu tingginya angka pengangguran. Jika pasar kerja bisa menyerap semua angkatan kerja dalam lapangan kerja, peningkatan TPAK akan memberikan nilai positif bagi perekonomian dan pembangunan wilayah.

Gambar 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sumbawa Barat, 2017-2020



TPAK pada tahun 2017 sebesar 62,40 persen. Pada tahun 2018, TPAK mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 71,42 persen dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 (68,75 persen). Sementara itu, pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 69,73 persen. Artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 69 orang yang terlibat dalam kegiatan perekonomian.

6.2. Tingkat Pengangguran

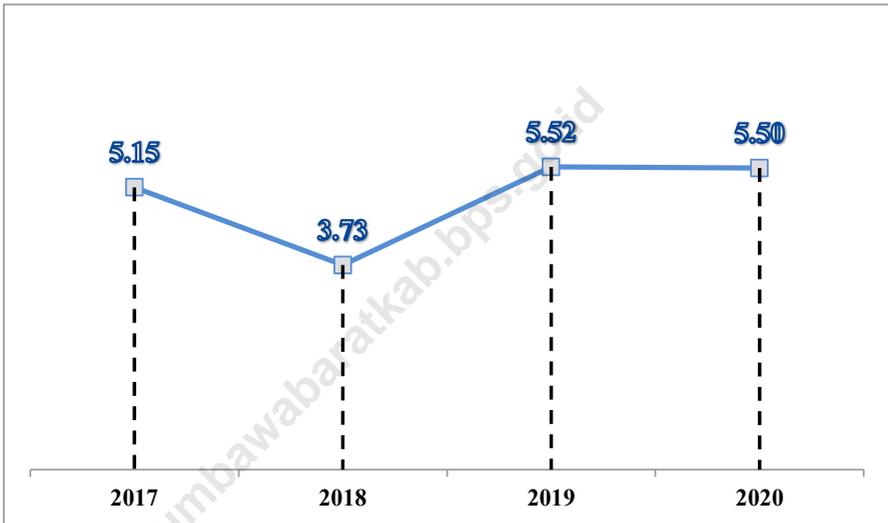
Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dll. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dari sisi pengangguran. TPT menggambarkan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam kategori pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Menurunkan angka pengangguran tidaklah mudah. Selain itu, isu pengangguran merupakan masalah yang sangat penting bagi pemerintah utamanya dalam melaksanakan program pembangunan

Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (5,15 persen) dan berada pada kisaran angka 3 persen. Namun, pada tahun 2019, TPT Kabupaten Sumbawa Barat mengalami lonjakan menjadi 5,52 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya kekeringan berkepanjangan sehingga membuat para pekerja di sektor pertanian terutama yang berstatus

sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar rentan untuk kehilangan pekerjaan. Sementara itu, pada tahun 2020, TPT Kabupaten Sumbawa Barat sedikit mengalami penurunan menjadi 5,50 persen.

Gambar 6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumbawa Barat, 2017-2020



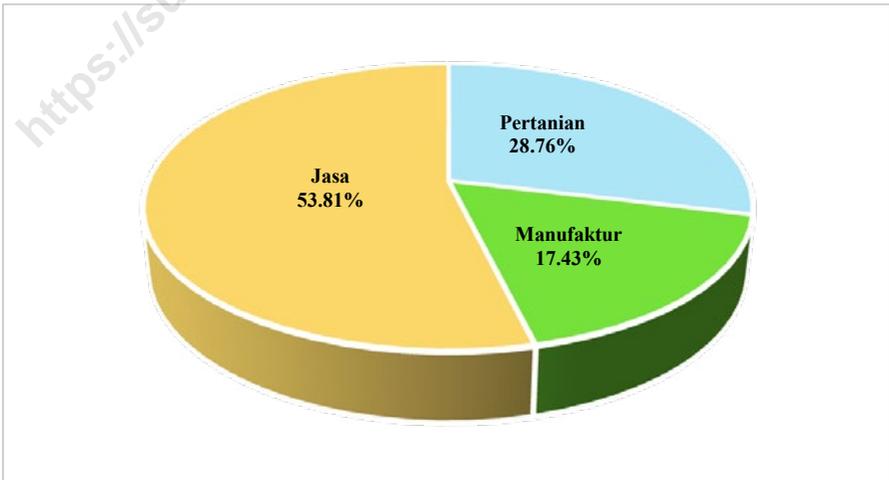
6.3. Lapangan Pekerjaan

Potensi dari lapangan usaha yang ada dalam perekonomian dapat tercermin dari besarnya penduduk yang bekerja pada kategori lapangan usaha tersebut. Dengan melihat besarnya jumlah pekerja yang diserap menurut lapangan pekerjaan, dapat dirumuskan kebijakan untuk mengamankan ketersediaan lapangan pekerjaan dan prospek ekonomi di masa yang akan datang. Hingga saat ini, Kabupaten Sumbawa Barat memang masih bergantung pada sektor pertanian dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Seseorang dapat memiliki lebih dari satu pekerjaan yang dibedakan menjadi pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan. Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak, namun apabila dua pekerjaan atau lebih menggunakan waktu yang sama maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Pekerjaan utama dikelompokkan menjadi beberapa lapangan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Sektor Jasa menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020, yaitu mencapai 53,81 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang ada. Sektor berikutnya yang paling berkontribusi dalam menyerap angkatan kerja adalah Lapangan usaha Pertanian (28,76 persen), dan sisanya sebesar 17,43 persen terserap pada sektor manufaktur.

Gambar 6.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sumbawa Barat, 2020

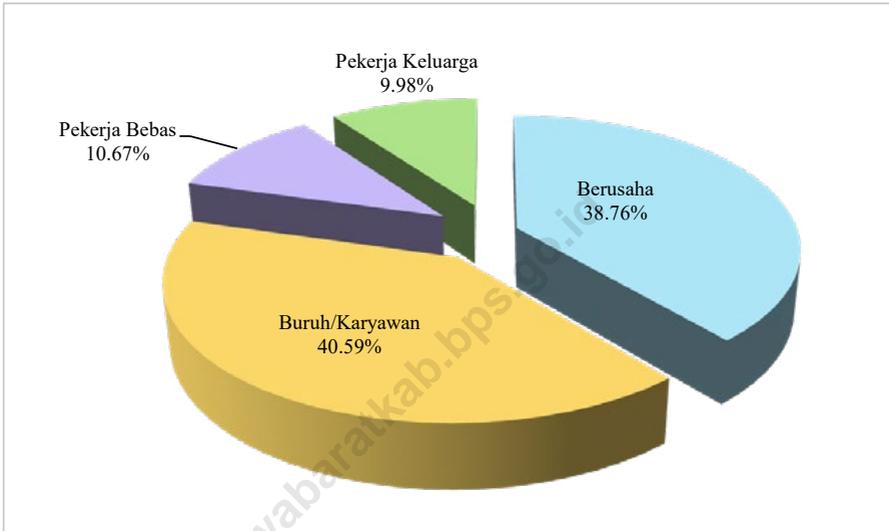


6.4. Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang di dalam pekerjaannya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Kedudukan sebagai berusaha, baik sendiri maupun dibantu oleh buruh, merupakan bentuk pekerjaan yang menanggung resiko secara ekonomis seperti tidak kembalinya modal dan mendapatkan laba/rugi. Sedangkan kedudukan sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah apabila seseorang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Status sebagai pekerja bebas hampir sama dengan buruh/karyawan/pegawai dengan perbedaannya adalah bahwa pekerja bebas tidak mempunyai majikan tetap (berganti-ganti majikan) atau memiliki lebih dari satu majikan dalam satu waktu secara bersamaan. Sementara itu, pekerja keluarga/tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapatkan upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja keluarga biasanya adalah anggota rumah tangga orang yang berusaha, misalnya istri/suami, anak, adik/kakak, keponakan, atau famili lainnya. Pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar digolongkan ke dalam sektor formal, sedangkan yang berstatus selain itu umumnya digolongkan ke dalam sektor informal.

Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Sumbawa Barat berstatus buruh/karyawan (40,59 persen). Persentase terbanyak berikutnya antara lain berusaha (38,76 persen), pekerja bebas (10,67 persen), dan pekerja keluarga (9,98 persen).

Gambar 6.5 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



BAB 7

KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI

13,34 Persen

Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

489.863 Rupiah

Garis Kemiskinan

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020



792.268 Rupiah

Rata-rata Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan
Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020



687.479 Rupiah

Rata-rata Pengeluaran untuk Konsumsi Non Makanan
Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020



Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain hak akan terpenuhinya kebutuhan pangan, terpenuhinya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Kemiskinan dapat muncul karena banyak faktor dan juga menyangkut banyak aspek seperti sosial, ekonomi bahkan budaya sehingga permasalahan kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang multidimensional dimana cukup sulit untuk mengukurnya dan diperlukan adanya suatu kesamaan pandang dalam pengukurannya.

Menurut Revallioon (1998), mengukur kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu menjadi perhatian banyak pihak, terutama pemerintah. Pembangunan senantiasa dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya, namun selalu saja masalah kemiskinan ini muncul ke permukaan. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Dengan sendirinya kemiskinan mutlak menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Berkurangnya penduduk miskin melambangkan meningkatnya kesejahteraan, begitu juga sebaliknya bertambahnya

penduduk miskin menjadi peringatan menurunnya kesejahteraan. Hal ini dapat dipahami karena secara konseptual, penduduk miskin merupakan penduduk dengan pendapatan rendah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang layak. Seiring dengan tuntutan global dan semakin cepatnya perubahan, strategi penanggulangan kemiskinan semakin beragam dengan inovasi yang diharapkan mampu dengan cepat memangkas kemiskinan.

7.1. Persentase Penduduk Miskin

Ukuran umum yang digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah persentase penduduk miskin (headcount index (P0)). Persentase merupakan produk sederhana yang merupakan proporsi antara penduduk miskin terhadap total penduduk. Keuntungan yang didapat dari indikator ini adalah bahwa ukuran ini mudah dihitung dan dipahami. Meskipun demikian ada juga kelemahan dari headcount index yaitu:

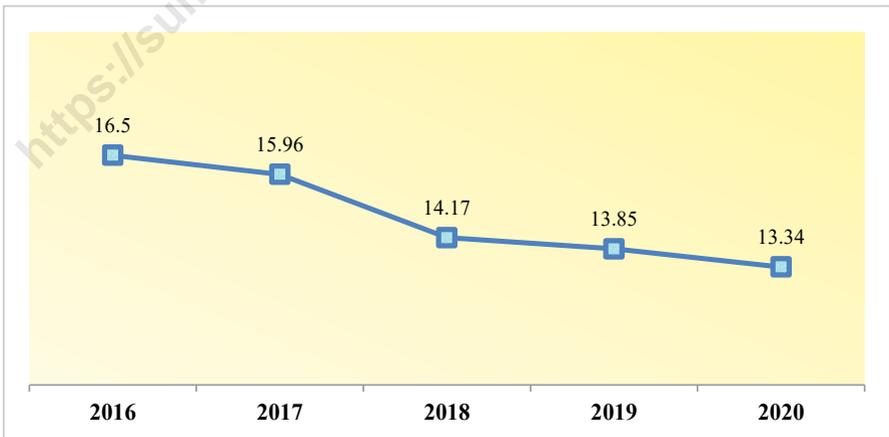
1. Tidak memperhitungkan intensitas kemiskinan diantara penduduk miskin,
2. Tidak mengindikasikan parahnya kemiskinan yang dialami penduduk miskin,
3. *Headcount index* hanya memberikan informasi agregat sehingga masih diperlukan informasi pendukung lainnya.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Sumbawa Barat tahun 2020 mencapai 20.200 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 250 jiwa dari jumlah penduduk miskin 22.450 jiwa pada tahun 2019.

Gambar 7.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020



Gambar 7.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020



Jika dilihat dari segi persentase, selama periode 2016-2020, penduduk miskin di Sumbawa Barat persentasenya menunjukkan tren menurun. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menggembirakan meskipun para pemangku kebijakan terlihat belum puas dengan capaian tersebut. Berdasarkan data tahun 2016, penduduk miskin Sumbawa Barat 16,50 persen dari total penduduk Sumbawa Barat. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan dan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sudah berkurang menjadi 13,34 persen dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berhasil menekan angka kemiskinan di Sumbawa Barat.

7.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan dikenal juga sebagai Poverty Gap Index (P1). Indeks ini memberikan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin saja, namun juga dapat mengurangi kedalaman kemiskinan sekaligus keparahannya. Tingginya nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Melalui ukuran Indeks Kedalaman Kemiskinan, dapat diperkirakan besarnya biaya yang diperlukan oleh pemerintah untuk dapat mengentaskan kemiskinan (relatif terhadap garis kemiskinan). Indeks ini memberikan gambaran besarnya uang yang harus ditransfer kepada penduduk miskin agar pendapatan mereka dapat mencapai garis

kemiskinan. Setiap penduduk miskin akan ditransfer (*lumpsum transfer*) agar dapat mencapai garis kemiskinan. Akan tetapi mengentaskan kemiskinan dengan cara ini bukanlah jalan keluar terbaik. Karena beberapa negara pernah mencobanya namun penurunan kemiskinan yang terjadi hanya bersifat temporer. Selain itu kebijakan ini memerlukan biaya yang sangat besar dan juga efek negatif karena yang terjadi adalah penduduk menjadi malas dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gambar 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun terakhir sangat berfluktuasi namun cenderung menurun. Jarak terdalam yang pernah dicapai adalah pada tahun 2016 dengan kedalaman sebesar 4,79 poin. Pada tahun 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat mampu mencapai titik terendah selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 2,04 poin.

7.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin satu dengan lainnya. Dimensi ketimpangan antara penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

Gambar 7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumbawa Barat, 2016-2020



Pola pergerakan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat cukup fluktuatif, tetapi pergerakannya cenderung tidak terlalu jauh. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat mencapai titik terendah pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 0,50 poin. Sedangkan titik tertingginya terjadi pada tahun 2016 dengan nilai indeks sebesar 1,70 poin. Melihat kecenderungannya, keparahan kemiskinan Sumbawa Barat masih berada pada level yang cukup rendah kurang dari 2 poin. Kebijakan yang sudah berlangsung seharusnya akan dapat menurunkan persentase penduduk miskin lebih banyak lagi pada periode mendatang.

7.4. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran per kapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan, maka ia tergolong penduduk tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia tergolong penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin begitu ada gejolak ekonomi.

Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat masih bernilai 435 ribu rupiah. Dalam kurun waktu 5 tahun, garis kemiskinan ini meningkat hingga mencapai 489 ribu rupiah pada tahun 2020. Apabila sebuah rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 4 orang anggota rumah tangga, maka pengeluaran rumah tangga tersebut harus melebihi 1.959 juta rupiah dalam satu bulan agar rumah tangga tersebut tidak tergolong dalam rumah tangga miskin.

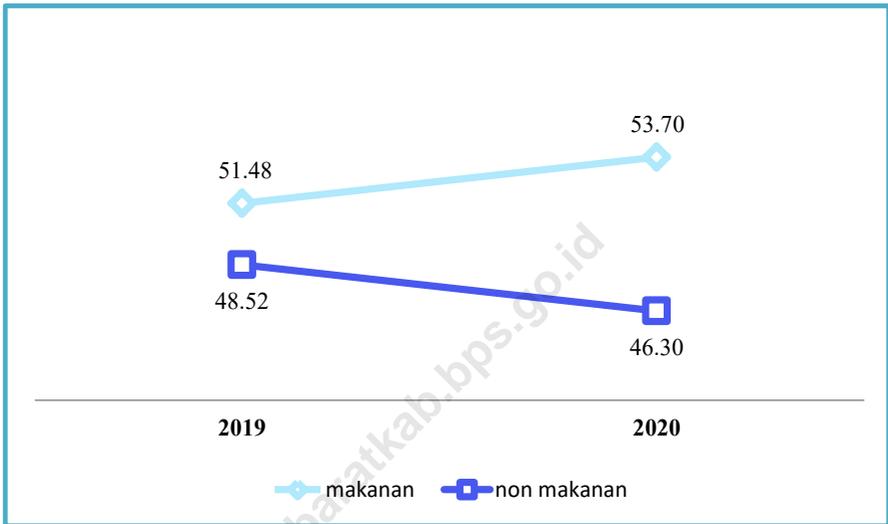
Gambar 7.5 Garis Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun, 2016-2020



7.5. Pola Konsumsi

Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ernst Engel, bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, semakin membaik tingkat perekonomian penduduk. Menurut Engel apabila persentase konsumsi makanan terhadap total pengeluaran lebih dari 80 persen, maka tingkat kesejahteraan sangat rendah. Seiring dengan perkembangan zaman, selera masyarakat juga mulai mengalami pergeseran. Norma, budaya, nilai yang telah berimbas oleh modernisasi mulai mengubah pola konsumsi masyarakat.

Gambar 7.6 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sumbawa Barat, 2019-2020



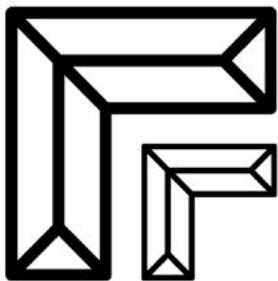
Hingga tahun 2020, komposisi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan masih lebih dari 50 persen. Persentasenya meningkat dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, sebanyak 53,70 persen dari total pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat digunakan untuk konsumsi makanan.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2019-2020, nilai nominal pengeluaran perkapita tercatat semakin meningkat. Pada tahun 2019, pengeluaran perkapita nominal berada pada level Rp 1.385.704. Angka ini meningkat ke level Rp 1.484.747 di tahun 2020. Peningkatan pendapatan perkapita nominal ini secara kasar menggambarkan kesejahteraan penduduk yang semakin membaik dengan catatan peningkatan dinikmati oleh semua penduduk secara merata.

Gambar 7.7 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Sumbawa Barat, 2019-2020



Bila dilihat dari pengeluaran untuk makanannya mengalami peningkatan dari 713 ribu rupiah pada tahun 2019 menjadi 797 ribu rupiah pada tahun 2020. Pengeluaran bukan makanan juga mengalami peningkatan dari 672 ribu rupiah tahun 2019 menjadi 687 ribu rupiah pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Sumbawa Barat semakin meningkat.



BAB 8 PERUMAHAN

Sebanyak **67,03** persen
rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat
menggunakan **tembok** sebagai
dinding rumahnya



Sebanyak **50,88** persen
rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat
menggunakan **keramik** sebagai
lantai rumahnya

Sebanyak **85,87** persen
rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat
menggunakan rumah **milik sendiri**
sebagai tempat tinggal

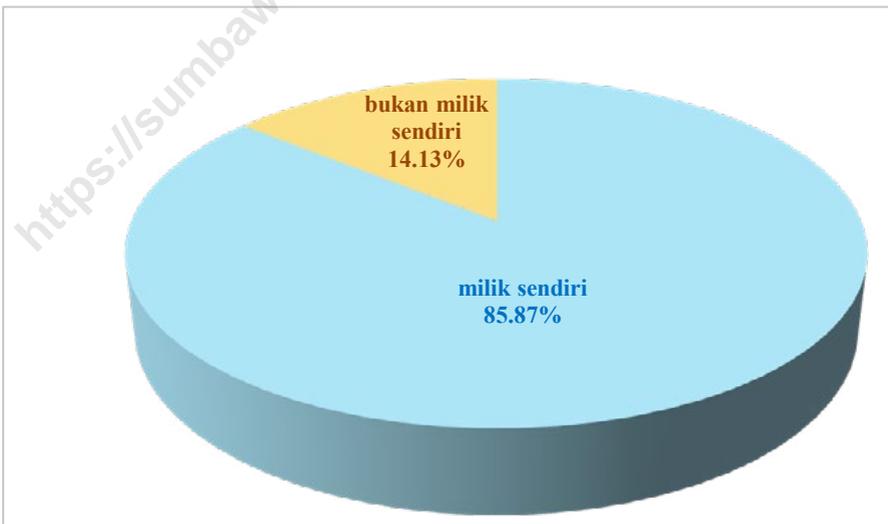
Salah satu kebutuhan primer bagi manusia adalah papan atau rumah. Rumah menjadi tempat dimana seseorang paling banyak beraktivitas untuk mendukung kegiatan sehari-harinya. Selain itu, rumah juga memiliki andil dalam pembinaan watak dan karakter seseorang. Di dalam rumahlah pendidikan yang paling dasar ditanamkan oleh keluarga. Maka rumah yang layak huni dan sehat akan mampu mencetak manusia-manusia yang berkualitas sehingga akan turut serta bergabung dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kualitas rumah yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari, dan berkelanjutan dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 1999 didefinisikan sebagai kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis. Oleh sebab itu, kualitas dari rumah ditunjang dari fasilitas yang ada di rumah tersebut.

Tidak hanya sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan, rumah juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Di zaman yang modern ini, rumah menjadi simbol kemapanan dan status sosial bagi pemiliknya. Rumah dengan fasilitas yang ada di dalamnya merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan bagi suatu rumah tangga. Memiliki sebuah rumah pun sudah menjadi simbol kesejahteraan karenanya status kepemilikan rumah menjadi salah satu indikator dalam kualitas perumahan. Kemudian kualitas perumahan yang baik ditandai dengan ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai. Karena untuk mendapatkan fasilitas perumahan yang baik, diperlukan pula biaya yang tidak sedikit. Beberapa fasilitas rumah yang dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang ada di rumah tersebut.

8.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal

Tinggal di rumah sendiri walau sempit tentu akan berbeda rasanya dibandingkan dengan tinggal di rumah milik orang lain, baik itu rumah sewa/kontrak maupun bebas sewa. Status kepemilikan rumah melambangkan status ekonomi seseorang di lingkungan tempat tinggalnya. Mahalnya biaya yang diperlukan untuk memiliki sebuah rumah sendiri membuat rumah tangga yang mampu membeli rumah diartikan sebagai rumah tangga yang sejahtera. Selain itu, pengeluaran rumah tangga akan mengerucut apabila tempat yang ditinggali merupakan rumah milik sendiri sehingga dana yang dimiliki rumah tangga tersebut dapat dialihkan untuk keperluan-keperluan lain.

Gambar 8.1 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, 2020

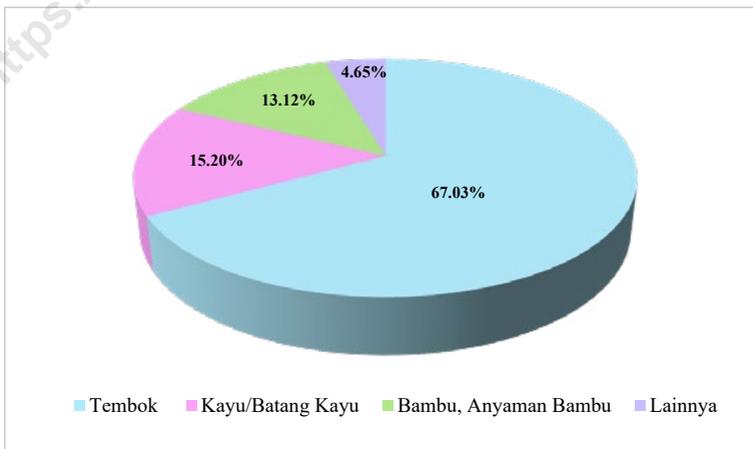


Berdasarkan data tahun 2020, sekitar 85,87 persen rumah tangga di Sumbawa Barat telah menempati rumah milik sendiri dan sisanya menempati rumah bukan milik sendiri seperti rumah sewa atau kontrak, rumah bebas sewa, atau rumah dinas. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri tidak selalu berarti bahwa ketersediaan perumahan masih kurang. Di antara alasannya bisa jadi karena harga rumah yang belum terjangkau atau karena faktor lainnya.

8.2. Kualitas Tempat Tinggal

Rumah yang berkualitas adalah rumah yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan. Syarat rumah layak huni antara lain memiliki dinding, atap, dan ventilasi udara. Kualitas dari fasilitas tersebut bergantung dari material yang digunakan. Misal dinding yang terbuat dari tembok merupakan yang direkomendasikan untuk digunakan agar rumah menjadi layak huni. Material dinding ini memiliki andil dalam keamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah.

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Secara umum ada sebanyak 67,03 persen rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat yang dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tembok. Sedangkan sisanya terbuat dari kayu/batang kayu (15,20 persen), bambu, anyaman bambu (13,12 persen), dan lainnya (4,65 persen).

Kualitas atap bangunan tempat tinggal juga memengaruhi standar kesehatan penghuninya. Atap yang terbuat dari genteng akan lebih berkualitas dibandingkan atap yang terbuat dari ijuk/rumbia. Karena atap yang terbuat dari genteng lebih tahan terhadap panas dan hujan. Terutama apabila terjadi kebakaran, atap yang terbuat dari genteng akan lebih lama terbakar dibandingkan atap yang terbuat dari ijuk/rumbia dimana bahan tersebut akan lebih mudah terbakar.

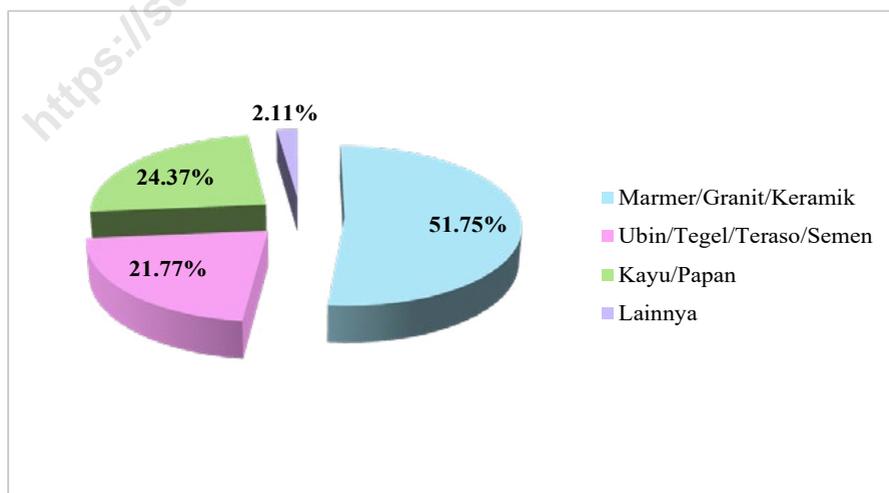
Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas Kabupaten Sumbawa Barat, 2020

Jenis Atap	Persentase
(1)	(2)
Beton	0,99
Genteng	40,24
Asbes	43,51
Seng	13,19
Bambu/Kayu/Sirap	0,14
Lainnya	1,93
Jumlah	100,00

Hasil Susenas 2020 memperlihatkan bahwa di Sumbawa Barat atap jenis asbes menjadi bahan atap terluas bagi sebagian besar rumah tangga, yaitu sebesar 43,51 persen. Jenis atap terbesar selanjutnya adalah jenis atap genteng yaitu sebesar 40,24 persen rumah tangga.

Berbeda dengan material dinding dan atap yang cenderung dominan pada satu jenis saja, material lantai bangunan rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat justru cenderung bervariasi. Bahkan jenis lantai yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di masing-masing wilayah berbeda antara satu dengan lainnya. Secara umum, rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat lebih banyak memilih bahan yang terbuat dari marmer/granit/keramik sebagai lantai bangunan tempat tinggalnya. Berdasarkan Gambar 8.3, sebesar 51,75 persen rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat lantai rumahnya terbuat dari marmer/granit/keramik.

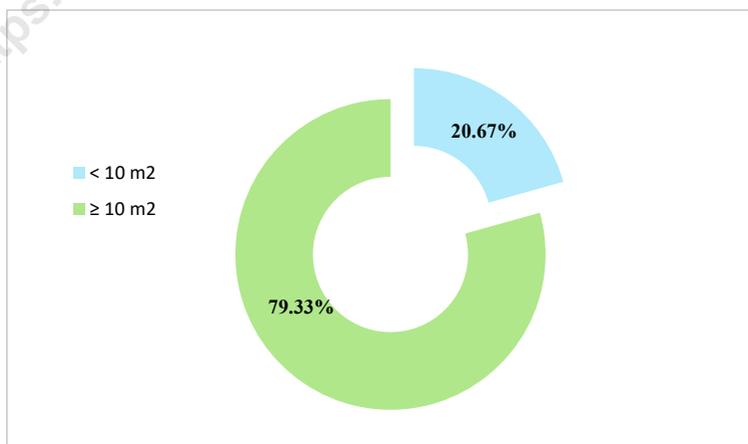
Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Selain bahan material yang digunakan untuk lantai bangunan tempat tinggal, luas lantai juga dapat dijadikan indikasi dari kesejahteraan sebuah rumah tangga. Semakin luas lantai bangunan yang ditempati oleh rumah tangga, maka diduga kesejahteraan rumah tangga tersebut lebih baik dibandingkan yang sempit. Luas lantai per anggota rumah tangga merupakan pendekatan terbaik mengenai kelayakan rumah untuk dihuni. Pada umumnya rumah tangga dengan luas lantai per kapita lebih dari atau sama dengan 10 m^2 mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 m^2 mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut masih belum sejahtera, walaupun tidak selalu berlaku demikian.

Secara umum di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 terdapat 79,33 persen rumah tangga dengan luas lantai per kapitanya lebih dari atau sama dengan 10 m^2 . Artinya sekitar seperlima rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat yang luas lantai per kapitanya masih kurang dari 10 m^2 .

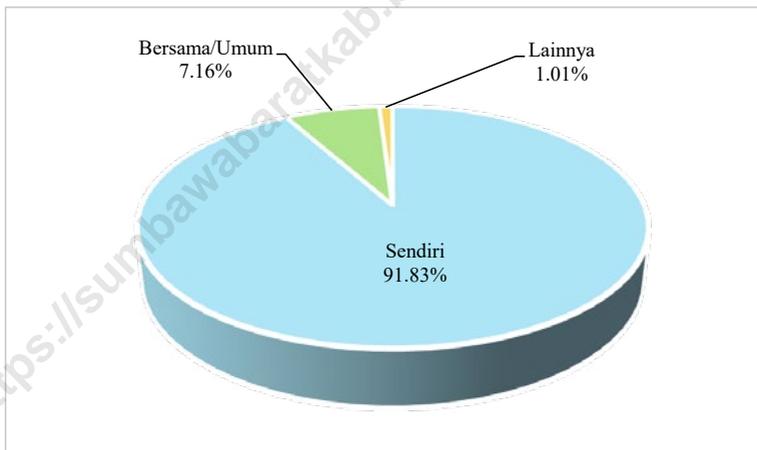
Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Per Kapita Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



8.3. Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas tempat tinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah itu sendiri. Fasilitas tempat tinggal tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan kenyamanan aktivitas sehari-hari, tetapi juga untuk memenuhi standar kesehatan. Beberapa fasilitas tempat tinggal yang sangat diperlukan oleh setiap rumah tangga adalah fasilitas BAB, penerangan, sumber air minum, bahkan juga tempat penampungan akhir tinja.

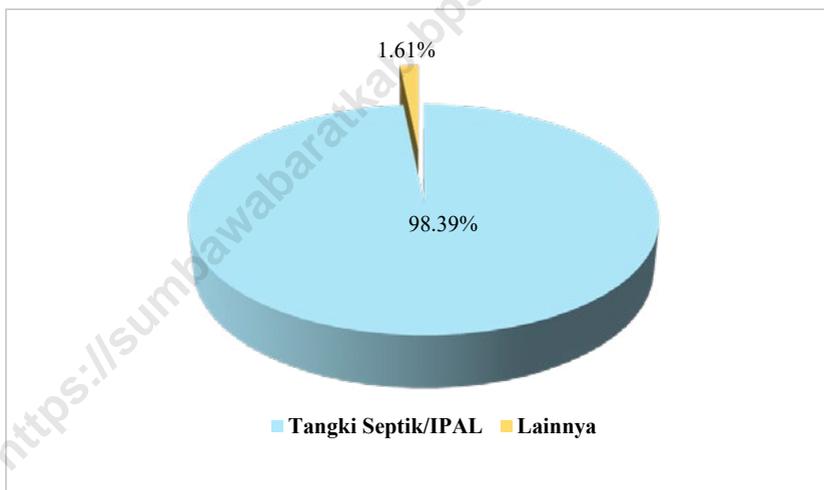
Gambar 8.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat bisa dikatakan merupakan penduduk yang paling sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan. Hal ini cukup beralasan karena pada tahun 2020 sudah ada sebanyak 91,83 persen rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Sedangkan, 7,16 persen rumah tangga lainnya menggunakan fasilitas buang air besar bersama/umum, dan 1,89 persen rumah lainnya.

Walaupun terkesan sepele namun keberadaan fasilitas BAB sangat penting. Selain status kepemilikan fasilitas BAB, yang tidak kalah penting lagi adalah tempat penampungan tinja. Jika penampungan tinja tidak benar maka dapat terjadi pencemaran air tanah oleh bakteri e-coli. Memang menyediakan tempat pembuangan tinja khusus menjadi beban biaya lebih bagi rumah tangga, namun hal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan rumah tangga dan lingkungannya.

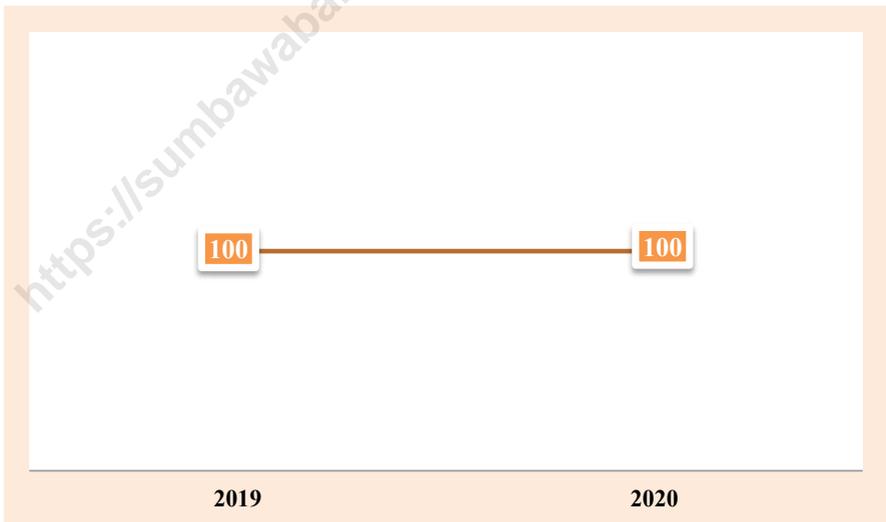
Gambar 8.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Pada umumnya, masyarakat Sumbawa Barat telah menggunakan tangki septik/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja, baik yang beralaskan semen maupun tanah. Hal ini terlihat dari Gambar 8.6 di atas. Ada sebanyak 98,39 persen rumah tangga di Sumbawa Barat yang menggunakan tangki septik/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja, sedangkan sisanya menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut lubang/pantai/tanah lapang/kebun/lainnya. IPAL atau Instalasi

Pengolahan Air Limbah merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain. Fasilitas tempat tinggal lainnya yang patut menjadi perhatian adalah sumber penerangan. Pada malam hari dimana tidak terdapat cahaya matahari, setiap rumah seharusnya mendapatkan penerangan yang cukup agar anggota rumah tangganya dapat melakukan kegiatannya. Selain itu dengan adanya penerangan yang cukup maka dapat menunjang kesehatan penghuninya, terutama kesehatan mata.

Gambar 8.7 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Sebagai Sumber Penerangan di Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Masalah kelistrikan seperti pemadaman bergilir, naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) berlangganan, dan usaha untuk mencari sumber listrik baru merupakan salah satu isu yang menjadi pusat perhatian banyak pihak. Gencarnya pihak PLN melakukan pengembangan dan pembangunan kelistrikan telah menyebabkan semua wilayah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat telah dialiri listrik. Pada tahun 2019 dan 2020 seluruh wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utamanya.

<https://sumbawabaratkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Jl. Pendidikan No. 269, Taliwang, Sumbawa Barat 84455

Telp/Faks 0817 1717 5207 / (0372) 81813

Website : <http://sumbawabaratkab.bps.go.id>

Email : bps5207@bps.go.id